

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada riset penulisan mengenai “Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari beberapa jurnal yang dipergunakan penulis dalam membantu mengidentifikasi dan mengkaji data yang diperoleh pada di tempat lokasi penelitian dengan penggunaan landasan teori pada riset yang ada pada peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini, penting untuk menganalisa sumber literatur atau tinjauan pustaka agar bisa menambah pengkajian bacaan, sehingga dapat menghindari pengulangan pembahasan yang mengarah pada plagiasi penelitian. Dengan teori-teori dahulu yang sudah dikumpulkan, peneliti bisa menggali ilmu pengetahuan yang berkaitan pada penelitian yang telah dilaksanakan. Pada penelitian ini teori yang dijelaskan adalah penjelasan tentang kerjasama, PKK dan ekonomi keluarga.

#### **2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Dalam riset penulisan yang punya kaitan kepada riset yang sudah dibuat dari peneliti yaitu dengan judul “Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK dalam Meningkatkan Ekononomi Keluarga di Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang”. Penulis harus melakukan studi literasi untuk menemukan dan memetakan riset-riset terdahulu pada objek yang mirip dan untuk menjadikan panduan dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Peneliti telah melakukan studi literatur atau mempelajari referensi untuk membantu dalam melakukan penelitian lapangan.

1. Fajriah Hapsari, Sinta Devi Surya, dengan judul “Efektivitas Kelembagan Masyarakat Sosial Pada Pemberdayaan Wanita dan Keluarga di Kelurahan Ciracas”. Pada riset yang dibuat peneliti bertujuan agar memahami peran kelembagaan sosial PKK melalui memberdayakan wanita dan keluarga pada program PKK di Kelurahan Ciracas. Metode yang dipakai pada riset penulisan tersebut ialah kuantitatif. Pada penggunaan teknik analis dengan cara analisis

SWOT yang bisa mengukur tingkat keefektifan PKK di Kelurahan Ciracas. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa Efektivitas program-program PKK upaya memberdayakan Wanita dan Keluarga sudah cukup efektif di Kelurahan Ciracas(Hapsari & Surya, 2018).

2. Tony Pathony, yang berjudul “Proses Pemberdayaan Masyarakat Dengan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) di Kabupaten Subang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih besar digunakan untuk mengungkapkan masalah dalam kehidupan kerja pengamatan organisasi pemerintah, wawancara, studi kepustakawanan dan dokumentasi. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Menurut teori pemberdayaan Edi Suharto tentang pemberdayaan sebagai sebuah proses, dalam memberdayakan masyarakat dengan cara gerakan yang dilakukan oleh PKK masih tidak berkembang secara ideal di Kabupaten Subang. Hal ini dikarenakan gerakan pemberdayaan dan PKK merupakan dua cara untuk memberdayakan masyarakat. Penilaian terhadap kesimpulan lapangan yang meliputi Pendorongan, Pengembangan, Pelindungan, Pendukungan, dan Pengawas, tidak sesuai pada penggunaan teori yang telah digunakan(Pathony, 2020).
3. Sri Defa, Nelis Mardiah, yang berjudul “Implementasian Program PKK Divisi Pemberdayaan Pendidikan didalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Lancong”. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat implementasi pelatihan program PKK pada bidang pemberdayaan pendidikan di desa Gampong Lancong. Sebab pendidikan dan kreativitas masyarakat yang dilakukan di Gampong Lancong juga belum berjalan maksimal. Metode penelitian yang Public Policy; Empowerment; Public digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan case study, teknik Welfare pengumpulan data dengan purposive sampling dengan jumlah responden enam orang dan tahapan penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun implementasi telah dilakukan,

sosialisasi untuk masyarakat Lancong di bidang pemberdayaan pendidikan belum dilakukan dengan baik. (Devfa & Mardhiah, 2022).

4. Eka Setianingsih, Nastya, Muh Askhal Basyir, dengan judul “Partisipasi Masyarakat didalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi”. Pada penelitian ini Permasalahan di Kelurahan Wandoka Utara adalah kurangnya pendidikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, peneliti juga melakukan analisis data. Semua data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya menunjukkan ketika ada terlibatnya masyarakat melalui pengimplementasian gerakan PKK inisiatif di Kelurahan Wandoka Utara, dilakukan dengan cara mengambil suara putusan yaitu implementasi, evaluasi, dan pemanfaatan hasil sudah berjalan cukup baik (Setianingsi et al., 2022).
5. Agus Maizar Suryanto Hertika, dkk, dengan judul “Program Pemberdayan PKK Pada Program Mengembangkan Sistem Akuaponik di Desa Ampeldento Karangploso Malang”. Permasalahan pada penelitian ini adalah kelompok PKK ini tidak memahami potensi lahan sempit yang dimiliki oleh keluarga adalah potensial bisa menambah gizi keluarga melalui pengembangan sistem budidaya akuaponik. Metode Penelitian Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuisioner. Evaluasi pemahaman masyarakat terhadap program dilakukan menggunakan pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan Setelah pengamatan dan penilaian, 95% masyarakat merasa bahwa akuaponik dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dan 70% dari mereka yang disurvei ingin melihat akuaponik tumbuh dengan sendirinya. Kesejahteraan sosial meningkat baik secara individu maupun finansial. (Hertika et al., 2021).

6. Fani Novi Alvianta, dkk, dengan judul “Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Dengan Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera”. Tujuan pada penelitian ini adalah mengkaji jumlah Kepala Keluarga yang sudah Sejahtera baik sisi Sosial dan Ekonomi dan menjadi bahan masukan yang bernilai bagi internal PKK. Metode penelitian yang di gunakan dalam meneliti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah Metode Kualitatif Deskriptif. Peneliti mengkaji dan melakukan penelitian dengan mendalam sehingga data yang di peroleh dapat sesuai yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari kesimpulan peneliti menunjukkan bahwa Meskipun belum semua ibu-ibu di daerah tersebut terinspirasi untuk berpartisipasi, PKK di RW 004 sudah aktif dalam memberdayakan perempuan di masyarakat. (Alvianta et al., 2021).
7. Fitriani, dkk, yang berjudul “Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Melalui Sosialisasi Program Kesehatan di Desa Sepukur Kecamatan Lantung”. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran gerakan Pemberdayan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mensosialisasikan program kesehatan di desa Sepukur. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh John W. Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PKK melalui interaksi dengan target kader PKK dan masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan target kesehatan. Sehingga tercapai tujuan melalui pelaksanaan program kesehatan yang telah ditetapkan dan pengawasan dengan menjaga agar sistem organisasi selalu berfungsi dengan baik. Tetapi dalam menjalankan tugas mensosialisasikan dirasa kurang maksimal yang disebabkan pada kegiatan program kesehatan belum meliputi semua kegiatan pada divisi POKJA IV (Fitriani et al., 2021).
8. Hena Herliana, yang berjudul “Fungsi Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) dengan Meningkatnya Pemberdayan Perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran”. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana fungsi PKK dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan dan dokumen yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapaun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Dalam menganalisis selama ini dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Pada hasil kesimpulan memaparkan di Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Sesuai fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Namun, tim penggerak PKK pusat mencatat bahwa terdapat punya beberapa indikator yang belum sesuai dengan fungsi PKK. Empat dari indikasi tersebut telah diimplementasikan, sementara tujuh sisanya belum.(Herlina, 2019).

9. Jenoardi Meleru, dkk, dengan judul “Efektivitas Pada Program Pemberdayan Kesejahteran Keluarga ( PKK ) Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan kesimpulan riset menunjukkan bahwasanya mengenai proses pengambilan keputusan, program diputuskan melalui proses demokratis yang melibatkan penggalian aspirasi anggota melalui diskusi dan penentuan program. Selain itu, program yang ditetapkan merupakan hasil dari musyawarah yang menunjukkan bahwa program tersebut sesuai pada kepentingan anggota.(Meleru et al., 2022).
10. Taufik Ramadhan, dkk, dengan judul “Peran Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga ( PKK ) untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sabulu Kabupaten Kutai Katanegara”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten

Kutai Kartanegara serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field research yaitu observasi, wawancara langsung dengan key informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data di peroleh dengan menggunakan teknik purposive sampling adalah pengambilan sample yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, ukuran sample tidak dipersoalkan. Dari hasil penulisan riset menunjukan bahwa PKK berupaya meningkatkan ekonomi keluarga pada Desa Sebulu Modern dengan merencanakan kegiatan dalam mengajarkan keterampilan memasak, membuat kerajinan tangan, meningkatkan pengetahuan para ibu, dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga yang merupakan ibu rumah tangga yang belum mendapatkan pekerjaan(Aini, 2018).

11. Suryani Barimbing, Yunisa Oktavia, dengan judul “Analisis Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) di Kecamatan Madau Kabupaten Bengkalis Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu agar dapat memajukan organisasi pemberdayaan perempuan (PKK). Metode yang digunakan didalam penulisan analisis organisasi organisasi PKK ini adalah menggunakan metode deskriptif ataupun menggunakan metode studi literatur. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa organisasi sosial PKK dalam meningkatkan pemberdayaan ini, yang terkhusus di Kecamatan Madau Kabupaten Bengkalis, yang sebagian besar telah berhasil. Tentu saja, masih ada indikasi yang tidak sesuai dengan harapan atau cara kerja program organisasi yang seharusnya.(Keluarga et al., 2022).

## **2.2 KERANGKA TEORI**

### **2.2.1 Kerja Sama**

Menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson (2014, h. 164) di dalam Josep Lubis (Tampan, 2021) kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup yang kita kenal. Kerjasama dalam kelompok menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kerja. Kerjasama dalam kelompok akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerjasama kelompok. Tanpa kerjasama yang baik tidak akan memunculkan ide-ide cemerlang. Kelompok kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah kelompok lebih baik dari pada kinerja perindividu di suatu perusahaan ataupun suatu perusahaan. Walaupun begitu, kerjasama kelompok juga harus efektif agar memberikan kontribusi yang baik bagi kinerja organisasi dan hasil kerja dalam suatu lembaga.

Teori tersebut sejalan dengan teori menurut Robert L. Clitrap dalam Roestiyah (2008: 15) pada jurnal Prakoso (Prakoso, 2023) menyatakan bahwa “kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam berkelompok bertujuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan adanya suatu tugas secara bersama-sama”. Dalam kerjasama ini biasanya terjadi adanya hubungan interaksi antar sesama anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai bersama-sama. Karena sesuai dengan definisi kerjasama menurut buku (Ambarwati, 2018) adalah tindakan mendukung tugas, tindakan, atau aktivitas yang dilaksanakan dengan kooperatif agar tercapainya cita-cita kebersamaan. Dengan demikian, seluruh anggota, atau seluruh penduduk negara, yang dikategorikan ke dalam manajer, pekerja, dan administrator berdasarkan tingkatannya masing-masing, membentuk sumber daya manusia organisasi. Kerja sama adalah suatu upaya yang dilakukan bersama-sama demi tercapainya suatu tujuan tertentu.

Menurut teori (Landsberger, 2011) kerjasama atau belajar bersama adalah proses berkelompok dimana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat. Selain itu kemampuan kerjasama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi,

serta melatih para anggota organisasi bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga bisa ditarik kesimpulan pada pendapat teori diatas bahwa kerjasama antar individu atau lebih bisa diartikan menjadi hubungan interaksi antara sesama manusia yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang pada riset dilakukan penulis mengenai kerjasama antara pemerintah desa dan PKK dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Pada perencanaan implementasinya Pemerintah Desa dan PKK Desa Tegalgondo melalui musyawarah mufakat. Sehingga perencanaan yang dilakukan bisa terimplementasi melalui program-program dalam mengatasi permasalahan aspek dalam sosial masyarakat desa Tegalgondo salah satunya permasalahan dicapai bersama dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

### **2.2.2 Bentuk Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK**

#### **A. The Roles of Government**

Pengertian peran secara historis telah berkembang perbedaan pemikiran antara dua kutub yang menyatakan perlu atau tidaknya peran pemerintah, yang sebenarnya perbedaan tersebut hanya terletak pada besaran atau kadar dari peran tersebut(Djadjuli, 2023). Pemerintah tetap memegang peranan penting dalam mengatur perekonomian suatu suatu negara, dikarenakan pengaturan kebijakan berada pada tangan pemerintah. peran itu sendiri bermaksud sebagai harapan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(Syaifudin & Ma'ruf, 2022).

Kerjasama Pemerintah Desa dan PKK mempunyai hubungan antara kepala dan bawahan lembaga. Dalam pelaksanaan fungsinya pada kerjasama dengan PKK, Kepala Desa mempunyai tiga fungsi fasilitator, katalisator dan regulator. Berdasarkan antara teori pemikiran-pemikiran para pakar sebelumnya, terdapat kesamaan dengan peran Pemerintah Desa dari teori yang dikemukakan oleh Gede Diva (Diva, 2009) diantaranya yaitu:

1. Fasilitator



Fasilitator adalah seseorang yang melakukan fasilitasi, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok. Tanggung jawab fasilitator adalah untuk lebih mengarahkan perhatian pada kelangsungan perjalanan dari pada terhadap tempat tujuan (Thoha & Susilo, 2021) peran Pemerintah Desa harus memberikan fasilitas bagi PKK saat melakukan pelaksanaan program kegiatan seperti menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung setiap pelaksanaan program kegiatan.

## 2. Regulator

Menurut pendapat teori George. J. Stigler dalam (Harefa, 2016) dalam Hayati (Hayati et al., 2022) mengemukakan bahwa fungsi primer regulasi merupakan untuk melindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat atau kelompok tertentu. Manfaat regulasi tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi, yaitu berdasarkan sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. yaitu membuat kebijakan-kebijakan yang akan berdampak untuk meningkatkan program kerja PKK desa dalam pelaksanaan program kegiatan. Seperti menentukan perencanaan dan pelaksanaan program kerja PKK.

## 3. Katalisator

Menurut teori (Thornberry & Krohn, 2017) tipe katalisator mengacu pada perilaku tingkat organisasi pemimpin. pemimpin katalis tidak secara langsung mendorong perubahan dan peluang. Atau, mereka merangsang inovasi, pendekatan baru dan tindakan kewirausahaan di antara bawahan mereka dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. disini Pemerintah Desa berperan sebagai pihak yang dapat mempercepat proses perkembangan para kader PKK dalam dalam pelaksanaan program kegiatan. Pemerintah Desa punya peran aktif dalam membantu PKK untuk mengembangkan program yang akan dilaksanakan. Seperti berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang membantu dalam pelaksanaan program kegiatan.

## **B. The Interaction of Public Officials**

Menurut pendapat teori (Battilana et al., 2010) interaksi kolaboratif antaranggota organisasi, membangun iklim sosial yang mendukung dan

mempromosikan praktik manajemen yang memastikan perlakuan yang adil di antara anggota organisasi. Dalam menghadapi perubahan, seorang pemimpin harus fokus pada tiga aktivitas kunci, yaitu komunikasi, mobilisasi, dan evaluasi. Interaksi antara pemerintah desa dengan PKK dan masyarakat itulah kemudian memerlukan pengaturan hukum baik yang bersumber dari undang-undang maupun melalui perjanjian atau kontrak rencana kerja yang dibuat oleh pemerintah dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Asikin, 2013)

Kerjasama Inteksi antara Peemerintah Desa dan PKK menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, selaras, dan serasi, karena interaksi yang terjadi bertujuan demi pemenuhan kepentingan bersama tanpa ada yang dirugikan (Denny Cahyadi & Wagian, 2024). Kerjasama Interaksi yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak Pemerintah Desa dan PKK yang terlibat saling memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa.

### **C. Sustainability Communications**

Teori sustainability pertama kali dikemukakan oleh (Meadows dkk. 1972) dalam Andini Wicaksana (Wicaksana et al., 2024) yang menjelaskan bahwa upaya masyarakat untuk memprioritaskan respon sosial terhadap masalah lingkungan dan ekonomi. Respon sosial ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan generasi masa depan. Pendapat tersebut sejalan dengan (Daud & Novrimansyah, 2022) Komunikasi tentang seluruh aspek pembangunan berkelanjutan (KPB) adalah suatu proses saling mengerti dan memahami antara pemerintah dan warga negaranya menuju suatu masyarakat yang terjamin masa depannya (sustainable society), dimana nilai-nilai dan norma-norma keadilan dijunjung tinggi (Daud & Novrimansyah, 2022).

Pendapat teori (Prasojo & Fauziah, 2015) Pembangunan berkelanjutan merupakan proses perubahan sosial yang ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan utama pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator

tercapainya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan. Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya unsur dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur dalam kerjasama tersebut harus ada dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek. Adanya unsur dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (Denny Cahyadi & Wagian, 2024).

#### **D. The Roles of Administrator**

Pendapat teori (Dr.H. Indra Muchlis Adnan, SH.MH.MM.Ph.D; & Hamim, 2013) administrator itu tidak berdiri sendiri, namun merupakan akibat lanjut daripada setiap orang atau badan yang mempunyai tugas yang harus ditunaikan secara terus menerus untuk jangka waktu yang cukup lama, atau yang mempunyai suatu usaha. Karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya (Tarigan et al., 2019).

Administrasi ada karena masyarakat yang membutuhkan, seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi oleh suatu organisasi. Dalam pelaksanaannya administrasi dilaksanakan oleh administrator, yakni petugas yang melekat pada administrasi itu sendiri. Agar tidak ada penyalahgunaan dalam pelaksanaan administrasi, maka administrasi harus dipelajari melalui suatu pendidikan atau pelatihan agar menjadi profesi (Marliani, 2018).

#### **E. Focus on The Policy**

Pendapat Teori (Gortner et al., 1988) Fokus Pada Kebijakan pengambilan keputusan itu sangat penting, juga merupakan kegiatan politik yang paling kompleks dalam suatu organisasi. Bukan hanya keputusan-keputusan mengenai kebijakan pokok yang rumit, tetapi juga pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, penempatan, dan penganggaran, merupakan titik-titik kritis terhadap mantapnya suatu

kebijaksanaan. Karena bagaimanapun, untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi pada mulanya struktur organisasi dibuat, pekerjaan dibagi, ditetapkan hubungan kewenangan dan tanggung jawab. Namun koordinasi bukan sesuatu yang secara otomatis dihasilkan secara sempurna dari struktur organisasi yang ada, kebijakan dan hubungan kewenangan (Candra Wijaya & Rifa'i, 2016).

Sejalan dengan (Aneta, 2012) Fokus pada Kebijakan dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta meningkatkan responsibilitas kebijakan Negara terhadap berbagai kebutuhan sosial, dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efisien.

### **2.2.3 Organisasi Sosial PKK**

#### **1. Organisasi Sosial PKK**

Menurut (Ramadani, 2020) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu kelompok perempuan yang mempunyai kepentingan di desa dan kelurahan. PKK adalah organisasi masyarakat desa yang berkontribusi dalam upaya pertumbuhan dan pembangunan desa dengan mengorganisir keterlibatan masyarakat desa. PKK adalah organisasi akar rumput yang menekankan peran perempuan sebagai penggerak utama dalam menciptakan, mengasuh, dan menyatukan keluarga untuk memenuhi kesejahteraan unit sosial terkecil, yaitu keluarga. PKK memiliki struktur kelembagaan di tingkat kabupaten, desa, provinsi, pusat, dan kecamatan.

Sementara itu, dalam upaya menjalankan proker PKK yang berkait melalui kesejahteraan keluarga di desa, para kader PKK melakukan administrasi kemasyarakatan yang melalui penggunaan penganggaran alokasi anggaran yaitu dana desa penjamin kebutuhan operasional simpan pinjam bagi ibu-ibu PKK di desa. Bagi Masyarakat desa yang paling diuntungkan dari program ini harus dilibatkan di setiap tahap-tahap dalam mengelola alokasi dana desa. (Sapitri & Alexandro, 2021). Sehingga bisa ditarik kesimpulan PKK berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang kesejahteraan keluarga. Dan mampu bergerak secara terstruktur melalui kerjasama dengan

Pemerintah Desa.

## **2. Tugas dan Fungsi PKK Desa**

- 1) Sebagai pelaksana kegiatan dari jadwal yang sudah disusun.
- 2) Melakukan diskusi dengan Ketua PKK dan Kader-kader PKK di Desa. Untuk program kemasyarakatan, terkhusus keluarga agar meningkatnya ekonomi keluarga
- 3) Melakukan penyusunan untuk Renja pada PKK di Desa, yang berkaitan kepada keputusan kebijakan PKK Kabupaten atau Kota.
- 4) Sebagai pelaksana kegiatan dalam penyuluhan dan penggerak berbagai kelompok PKK yang ada di lingkungan Dasawima, RT, RW dan Dusun supaya dapat terlaksana dan tercapai kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.
- 5) Mengamati, mendorong dan menggali potensi untuk dikembangkan demi tercapainya kesejahteraan keluarga yang berkaitan dengan kebijakan yang sudah dibuat.
- 6) Menyelenggarakan program menyuluhkan pada aktivitas yang termasuk pada pembimbingan dan mendorong pada keluarga-keluarga demi terwujudnya keluarga yang sejahtera.
- 7) Melaksanakan pembimbingan juga pembinaan yang terkait teknis pada program kerja.
- 8) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program kebijakan sesuai dengan program-program mensejahterakan keluarga yang ada di Desa.
- 9) Menyusun dan mengerjakan hasil program-program kegiatan berupa hasil laporan yang akan diserahkan pada tingkat Ketua PKK Desa atau kelurahan juga di tingkat PKK yang ada di kecamatan.
- 10) Mewujudkan ketertiban dalam beradministrasi.
- 11) Memberi informasi, diskusi dan komunikasi terkait perencanaan kerja bersama dengan Kepala Desa juga Camat dan diteruskan pada tingkat Bupati ataupun Walikota melewati para OPD yang diutus melakukan pendampingan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu pada tingkat Kota

atau Kabupaten yang disebut PKK, supaya pada perencanaan program kerja PKK di Desa ataupun Kelurahan dapat menjadi acuan penting dari bagian pemberdayaan di tingkat Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten ataupun Kota.

Sesuai dengan pengertian dan tugas PKK diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap perempuan mempunyai hak dalam memenuhi aspek-aspek seperti pendapatan, pemenuhan kebutuhan hidup, pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pemenuhan sandang, pangan dan papan.

### **2.2.3 Ekonomi Keluarga**

#### **2.2.3.1 Pengertian Ekonomi Keluarga**

Menurut (Soekanto, 1986) definisi keluarga adalah didasarkan atas ikatan perkawinan yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak yang belum menikah keluarga tersebut lazimnya juga disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dalam proses pergaulan hidup. Berkaitan dengan penelitian (Lano, 2017) Ekonomi keluarga adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang berusaha memenuhi kebutuhan mereka melalui tindakan orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kebutuhan mereka. Ekonomi adalah bagian dari upaya untuk mengangkat manusia dari cengkeraman kemiskinan. Seseorang dapat hidup makmur dan damai dengan ekonomi yang cukup atau bahkan tinggi, yang akan memberi mereka yang berjiwa damai kesempatan yang baik untuk memperbaiki nasib mereka dalam kehidupan juga.

Tuntutan masyarakat modern saat ini semakin meningkat, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Karena itu, wanita tidak lagi dipandang sebagai ibu rumah tangga, melainkan memainkan peran aktif dalam banyak aspek kehidupan sosial di lingkungan sekitar, sering kali bekerja bersama suami atau bahkan mendukung bisnis keluarga. Kemajuan teknologi dan pengetahuan sering dikaitkan dengan peningkatan kecerdasan manusia. Bersamaan dengan hal ini, peran wanita dalam kehidupan selalu berevolusi dari berjalannya waktu untuk berperan dalam memenuhi kesulitan dalam kehidupan sosial terutama dalam hal kesejahteraan keluarga. Seorang pria atau pasangan sering kali menjadi pilar rumah tangga. Namun, kini banyak wanita yang secara aktif berkontribusi

terhadap stabilitas keuangan keluarga mereka (JEISKE SALAA, n.d.). Sehingga bisa ditarik kesimpulan dari pendapat di atas mengenai ekonomi keluarga adalah suatu kajian pada setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui aktifitas yang dilakukan dalam keluarga. Juga peran penting wanita di dalam keluarga untuk memainkan peran aktif dalam pemenuhan aspek dalam kebutuhan keluarga khususnya ekonomi.

